

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang pada awal pembangunan perekonomiannya berorientasi pada sektor pertanian sebagai sektor primer. Salah satu ciri-ciri negara berkembang ialah memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dan sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan serta hanya sebagian kecil saja yang tinggal di perkotaan, ini mencirikan bahwa negara Indonesia merupakan negara agraris yaitu negara pertanian.

Sektor pertanian di Indonesia termasuk salah satu sektor utama dalam kegiatan ekonomi Indonesia, karena sektor pertanian yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor, penyedia bahan baku bagi industri, serta penanggulangan kemiskinan. Lebih dari 50 persen penduduk menggantungkan hidup di sektor pertanian. Dari 23 juta kepala keluarga petani, sebagian besar dari mereka ialah perempuan, istri atau ibu yang juga terlibat di sektor pertanian. Jumlah perempuan itu sendiri sebanyak 49,66 persen atau sekitar 118 juta lebih, hampir separuh dari jumlah penduduk nasional 237,6 juta, atau hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki 50,34 persen atau sekitar 119 juta lebih. BPS mencatat jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 265 juta jiwa, naik 12,8 juta jiwa selama kurun waktu 2014 – 2018. Dengan kenaikan penduduk tersebut, kebutuhan konsumsi 2014 – 2018 meningkat 1,7 juta ton beras. Program kebijakan pangan yang dijalankan Kementan berdampak pada peningkatan produksi pangan. Pada 2017,

produksi padi meningkat sebesar 10,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 3,23 miliar dollar AS. (Kompas, 2018)

Apabila dilihat dari segi historisnya, pertanian dari tahun ke tahun masih menjadi sektor yang tangguh dan tahan terhadap perubahan struktural kinerja perekonomian dan pasar kerja di Indonesia. Jumlah pekerja pada sektor pertanian meskipun menurun tiap tahunnya, masih merupakan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Keunggulan sektor pertanian tersebut terbukti ketika pasar kerja mengalami perubahan drastis di era krisis moneter, hanya dalam setahun pada 1997-1998, sektor yang bukan pertanian berkurang lebih dari 4,3 juta jiwa, padahal dalam kurun sebelumnya (1990-1997) telah berkurang sekitar 6,7 juta jiwa. Peralihan tenaga kerja ke sektor pertanian selama krisis memperlihatkan kelenturan atau fleksibilitas pasar tenaga kerja. (Silalahi & Sahat, 2004)

Program pemerintah yang berfokus pada masalah pertanian, program yang berkaitan dengan revitalisasi lembaga petani adalah program yang ditujukan untuk gabungan kelompok tani (Gapoktan). Menurut peraturan Kementerian Pertanian Nomor 82 Tahun 2013, Gapoktan ialah sebagai fasilitator kegiatan pertanian dari permodalan hingga pemanenan. Gapoktan atau gabungan kelompok tani ialah organisasi yang memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah terhadap petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Litbang, 2007). Disini terlihat bahwa pembentukan Gapoktan kepada kepentingan yaitu sebagai kendaraan untuk menyalurkan dan menjalankan berbagai kebijakan dari

luar desa. Saat ini Gapoktan diberi pemaknaan baru, termasuk bentuk dan peran yang baru.

Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Pemberdayaan petani dan usaha kecil di pedesaan oleh pemerintah hampir selalu menggunakan pendekatan kelompok.

Gapoktan pada hakekatnya bukanlah lembaga dengan fungsi yang baru sama sekali, namun hanyalah lembaga yang dapat dipilih di samping lembaga-lembaga lain yang juga terlibat dalam aktivitas ekonomi secara langsung. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga penyedia sarana produksi pertanian, serta sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Gapoktan diharapkan dapat menjalankan fungsi kemitraan dengan adil dan saling menguntungkan (Syahyuti, 2007). Lembaga Gapoktan memiliki peran dan fungsi untuk memberikan dukungan dalam upaya memaksimalkan potensi pertanian.

Dalam upaya mengatasi permasalahan pertanian di pedesaan, pada tahun 2008 pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya dikenal dengan sebutan PUAP yang merupakan bagian dari pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran (Kementerian Pertanian, 2011). Dalam rangka pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian, maka Menteri Pertanian telah membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dengan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor: 545/Kpts/OT.160/9/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:16/Permetaan/OT.140/2/2008, pada tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Umum PUAP. Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan, penyaluran, dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM-PUAP) diperlukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara sistematis, berjenjang, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak tahun 2014, total dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) di Kabupaten Tuban sebesar Rp. 11 Milyar. Sedangkan jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima sebanyak 110 dan masing-masing menerima dana Rp. 100 juta. Tujuan program ini diantaranya ialah mengatasi persoalan petani terhadap ketersediaan permodalan. Selain itu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja dipedesaan. Di Kabupaten Tuban, program dari pemerintah pusat ini sebagian besar masih dimanfaatkan untuk dana talangan pupuk petani oleh Gapoktan.

Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tuban yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha

agribisnis di pedesaan sesuai potensi wilayah, meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan PMT, memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau lembaga keuangan dengan tujuan akhir yaitu peningkatan pendapatan petani.

Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian ini adalah: **“Efektivitas Tingkat Pendapatan Melalui Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Tuban”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendapatan petani Melalui Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Tuban?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pendapatan petani Melalui Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Tuban?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah, yang bertujuan agar peneliti lebih terfokus pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian kali ini berfokus pada pendapatan petani Melalui Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Penelitian ini hanya terfokus pada poktan padi di Kabupaten Tuban yang mengikuti program PUAP.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dihadapi, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan tingkat pendapatan petani Melalui Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Tuban.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan tingkat pendapatan petani Melalui Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Tuban.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para petani mengenai permasalahan terkait dengan upaya peningkatan pendapatan dengan melalui Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan pertimbangan dan tambahan referensi untuk melakukan dan menyusun penelitian dengan topik yang sama ataupun untuk penelitian lebih lanjut.